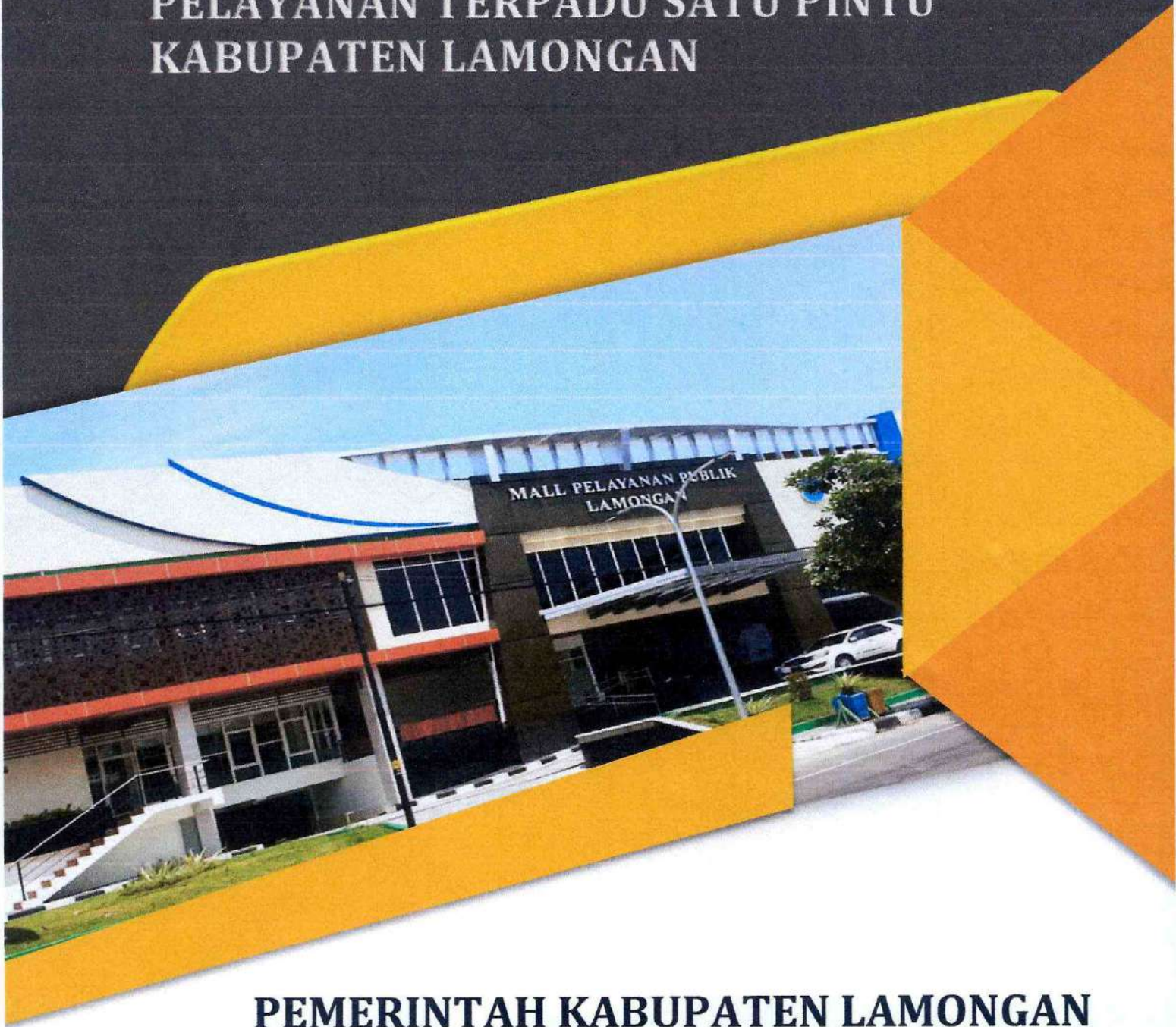


# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMONGAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2024**



---

**KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program/ Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu RENJA berfungsi untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (RENJA DPMPTSP) Kabupaten Lamongan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Lamongan. Program dan Kegiatan pada Renja 2025 ini mengacu pada Program dan Kegiatan dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Lamongan tahun terahir serta mengevaluasi Program dan Kegiatan yang telah berjalan pada tahun sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja 2025) disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategi, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif. Melalui Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program /kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Lamongan, Agustus 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMONGAN**



**Drs. HAMDANI AZAHARI, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651021 198602 1 00

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD sehingga penyusunan Renja SKPD berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA DPMPTSP Kabupaten Lamongan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Lamongan, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi, dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2024;
3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.



---

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026; dan
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 71 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Tahun 2023 dan perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2025.



### 1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2025 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan RENJA DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2025 meliputi:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB II HASIL EVALUASI DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN LALU (TAHUN 2023)

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPMPTSP



Kabupaten Lamongan Tahun 2023

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Lamongan
- 2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Lamongan
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN**

Bab ini memuat :

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Lamongan tahun 2025
- 3.3 Program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Lamongan tahun 2025

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN**

**BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat :

- a. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah – kaidah Pelaksanaan
- c. Rencana Tindak Lanjut



**BAB II**

**HASIL EVALUASI DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023**

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Lamongan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 sebagaimana Tabel T-C.29



Tabel T-C.29  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan skpd tahun lalu 2023			Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) 2024	Target program/kegiatan renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Wajib										
2 18	Penanaman Modal Daerah										
2 18 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	100%		100%	100%	100%	Nilai IKM Internal Dinas Penanaman Modal & PTSP	83,20%	83,20%	100%
2 18 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
2 18 01 2.01 01	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%



## RENJA DIKAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

					perangkat daerah	Perencanaan									
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%	Jumlah Dokumen Evaluasi	2 Laporan	2 Laporan	100%
2	18	01	2.01		Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	100%	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	15 Laporan	15 Laporan	100%
2	18	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 Orang		27 Orang	27 Orang	100%	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 Orang	27 Orang	100%
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	100%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	14 Laporan	14 Laporan	100%



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

						Keluaran Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD						Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian yang dipenuhi	2 Administrasi		2 Administrasi	2 Administrasi	100%	Jumlah administrasi kepegawaian yang dipenuhi	-	-	-
2	18	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pemenuhan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	Jumlah pemenuhan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	-	-	-
2	18	01	2.05	09	Pendidikan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	20 Orang		20 Orang	20 Orang	100%	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	-	-	-
2	18	01	2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Administrasi		6 Administrasi	6 Administrasi	100%	Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Administrasi	6 Administrasi	100%
2	18	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik	22 Paket		22 Paket	22 Paket	100%	Jumlah alat listrik dan elektronik	22 Paket	22 Paket	100%



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dipenuhi	6 Paket		5 Paket	5 Paket	100%	Jumlah peralatan rumah tangga yang dipenuhi	6 Paket	6 Paket	100%
2	18	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Jenis		4 Jenis	4 Jenis	100%	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
2	18	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 Paket		5 Paket	5 Paket	100%	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 Paket	3 Paket	100%
2	18	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	100%	Jumlah bahan bacaan	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
2	18	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	100%	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5 Laporan	5 Laporan	100%
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	100%	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	100%
2	18	01	2.07		Pengadaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan	3 Jenis		3 Jenis	3 Jenis	100%	Jumlah Jenis Pengadaan	-	-	-



## RENJA DIAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	100%	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-
2	18	01	2.07	06	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	100%	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-
2	18	01	2.07		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>3 Jenis</b>		<b>3 Jenis</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>100%</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>100%</b>
2	18	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	4 Laporan	100%
2	18	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Laporan	3 Laporan	100%
2	18	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan	3 Laporan	100%



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

						kantor yang disediakan						yang Disediakan			
2	18	01	2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang yang dipelihara	4 Jenis		4 Jenis	4 Jenis	100%	Jenis Barang yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	100%
2	18	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	100%
2	18	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	100%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	100%
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33 Unit		33 Unit	33 Unit	100%	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33 Unit	33 Unit	100%



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	Jumlah Gedung yang dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase Peningkatan Minat Investasi	65,2%		64,7%	64,7%	100%	Prosentase Peningkatan Minat Investasi	65,2%	65,2%	100%
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota	Jumlah Fasilitas / Insentif Penanaman Modal yang diberikan	35%		35%	35%	100%	Jumlah Fasilitas / Insentif Penanaman Modal yang diberikan	35%	35%	100%
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provisi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	-	Jumlah Peraturan Daerah/Provisi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Data Untuk Peta Potensi Investasi	35%		35%	35%	100%	Jumlah Data Untuk Peta Potensi Investasi	35%	35%	100%



## RENJA DIINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	02	2.02	04	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Potensi Investasi yang dikembangkan	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	80%			70%	70%	100%	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	80%	80%	100%
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Kegiatan			2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	4 Pemeliharaan			4 Pemeliharaan	4 Pemeliharaan	100%	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	-	-	-
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Perizinan yang Diterbitkan dalam Satu Tahun	3803 Izin			3803 Izin	3803 Izin	100%	Jumlah Perizinan yang Diterbitkan dalam Satu Tahun	20.363 Izin	20.363 Izin	100%



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Izin Melalui OSS dan Sistem Daerah	2614 Izin		40.117 Izin	40.117 Izin	100%	Jumlah Penyelesaian Izin Melalui Sistem OSS dan Sistem Daerah	2614 Izin	2614 Izin	100%
2	18	04	2.01	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	40.117 Izin		40.117 Izin	40.117 Izin	100%	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	5.000 Pelaku Usaha	5.000 Pelaku Usaha	100%
2	18	04	2.01	07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Tersedianya layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan	750 Orang		-	-	-	Tersedianya layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	750 Orang	750 Orang	100%



**RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

						dan non perizinan									
2	18	04	2.01	008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah kegiatan yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	30 Kegiatan Usaha	-	-	-	Jumlah kegiatan yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	30 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	100%	
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Pengendalian Perusahaan yang berinvestasi	66,53%	66,03%	66,03%	100%	Prosentase Pengendalian Perusahaan yang berinvestasi	66,03%	66,03%	100%	



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penanaman Modal PMDN dan PMA	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	Pembinaan Penanaman Modal PMDN dan PMA	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	18	05	2.01	04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	75 Kegiatan Usaha	-	-	-	-	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	75 Kegiatan Usaha	75 Kegiatan Usaha	100%
2	18	05	2.01	05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20 Pelaku Usaha	550 Pelaku Usaha	550 Pelaku Usaha	100%	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	100%	



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	05	2.01	06	Pengawasan Pelaksanaan Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	300 Kegiatan Usaha		500 Kegiatan Usaha	500 Kegiatan Usaha	100%	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	300 Kegiatan Usaha	300 Kegiatan Usaha	100%
2	18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola	1,5%		1,5%	1,5%	100%	Prosentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola	2,0%	2,0%	100%
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada Tingkat	Jumlah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Terintegrasi	63 Perizinan		63 Perizinan	63 Perizinan	100%	Jumlah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Terintegrasi	65 Perizinan	65 Perizinan	100%



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

					Daerah Kabupaten/K ota									
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatka n	65 Dokumen	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik	65 Dokumen	65 Dokumen	100%



Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja di atas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh 6 program, dimana didalamnya terdiri dari 1 program pendukung dan 5 program utama yang mana target kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja program yang telah tercapai, meliputi :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - c. Program Promosi Penanaman Modal
  - d. Program Pelayanan Penanaman Modal
  - e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - f. Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal
2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan memiliki 13 kegiatan yang terdiri dari 7 kegiatan pendukung dan 6 kegiatan utama yang mana target kinerja dari semua kegiatan tersebut telah teralisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah:

- a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
- b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
- c. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:



Tabel T-C.30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Prosentase peningkatan realisasi Investasi PMDN	-	-	1.5%	2%	2.5%	3%	3.5%
2	Prosentase peningkatan realisasi Investasi PMA	-	-	1.5%	2%	2.5%	3%	3.5%
3	Prosentase Penyelesaian Izin tepat waktu	-	-	99.47%	99.57	99.67	99.77	99.87
4	Nilai SKM DPMPTSP	-	-	83.22	83.85	84.48	85.11	85.73
5	Nilai SAKIP DPMPTSP	-	-	86.80	86.81	86.82	86.83	86.84



Lanjutan Tabel T-C.30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

No	Indikator	Realisasi Capaian	Proyeksi					Catatan Analisis
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Prosentase peningkatan realisasi Investasi PMDN	30,00%	558%	89%	-	-	-	
2	Prosentase peningkatan realisasi Investasi PMA	199.979.240.975	187%	-58%	-	-	-	
3	Prosentase Penyelesaian Izin tepat waktu	30,00%	99.70%	99.71%	-	-	-	
4	Nilai SKM DPMPTSP	-	88.85	88.97	-	-	-	
5	Nilai SAKIP DPMPTSP	86.78	87.75	88.15	-	-	-	



### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apa bila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu penting Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan adalah :

1. Target peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang mencapai 3,55 – 5,43 % per tahun, dengan salah satu tumpuannya adalah peningkatan realisasi investasi.
2. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan publik pemerintah Kabupaten Lamongan terutama terkait dengan pelayanan perijinan yang tepat waktu.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD**

Rencana Kerja ( Renja ) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan



## **RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

---

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

Program dan kegiatan Tahun 2024 yang telah diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan merupakan rancangan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2024 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan sebagaimana pada tabel dibawah ini .



**Tabel T-C.31  
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024  
Kabupaten Lamongan**

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2		4	5	6	2		4	5	6	
	<b>Wajib</b>					<b>Wajib</b>					
	Penanaman Modal Daerah				5.590.477.420	Penanaman Modal Daerah				5.337.974.000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>Nilai IKM Internal Dinas Penanaman Modal &amp; PTSP</b>	<b>83,20%</b>	<b>4.710.813.420</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>Nilai IKM Internal Dinas Penanaman Modal &amp; PTSP</b>	<b>83,20%</b>	<b>4.483.793.000</b>	
	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Perencanaan</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>17.000.000</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Perencanaan</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>17.000.00</b>	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	8.500.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	8.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi	2 Laporan	8.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi	2 Laporan	8.500.000	APBD Kab.
	<b>Administrasi Keuangan</b>		<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan</b>	<b>15 Laporan</b>	<b>3.232.771.000</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>		<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan</b>	<b>15 Laporan</b>	<b>2.964.751.000</b>	APBD Kab.



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 Orang	3.215.771.000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 Orang	2.947.751.000	APBD Kab.
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	8.500.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	8.500.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Laporan	8.500.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Laporan	8.500.000	APBD Kab.
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah administrasi kepegawaian yang dipenuhi</b>	-	<b>5.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah administrasi kepegawaian yang dipenuhi</b>	-	-	APBD Kab.
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah pemenuhan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	-	-	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah pemenuhan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	-	-	APBD Kab.
	Pendidikan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	-	5.000.000	Pendidikan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	-	-	APBD Kab.



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Administrasi	128.124.420	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Administrasi	106.124.000	APBD Kab.
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik	22 Paket	15.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik	22 Paket	10.000.000	APBD Kab.
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dipenuhi	6 Paket	10.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dipenuhi	6 Paket	10.000.000	APBD Kab.
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	25.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	20.000.000	APBD Kab.
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 Paket	20.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 Paket	20.000.000	APBD Kab.
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	8 Dokumen	10.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	8 Dokumen	8.000.000	APBD Kab.
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5 Laporan	8.124.420	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5 Laporan	8.124.000	APBD Kab.
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 Laporan	40.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 Laporan	30.000.000	APBD Kab.
	<b>Pengadaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Pengadaan</b>	-	<b>1.000.000</b>	<b>Pengadaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Jumlah Jenis Pengadaan</b>	-	<b>0</b>	APBD Kab.



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

						Pemerintah Daerah					
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	500.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0	APBD Kab.
	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	500.000	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0	APBD Kab.
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>1.156.618.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>1.132.918.000</b>	APBD Kab.
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	361.482.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	337.482.000	APBD Kab.
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Laporan	13.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Laporan	13.000.000	APBD Kab.
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	782.436.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	782.436.000	APBD Kab.
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jenis Barang yang dipelihara</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>170.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jenis Barang yang dipelihara</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>263.000.000</b>	APBD Kab.
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	15 Unit	42.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	15 Unit	42.000.000	APBD Kab.



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

dinas atau kendaraan dinas jabatan		Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	20.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	20.000.000	APBD Kab.
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33 Unit	58.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33 Unit	95.000.000	APBD Kab.
Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	DPMPPTSP	Jumlah Gedung yang dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung yang dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	106.000.000	APBD Kab.
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Prosentase Peningkatan Minat Investasi</b>	<b>65,2%</b>	<b>35.500.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Prosentase Peningkatan Minat Investasi</b>	<b>65,2%</b>	<b>6.000.000</b>	APBD Kab.
<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota</b>		<b>Jumlah Fasilitas / Insentif Penanaman Modal yang diberikan</b>	<b>35%</b>	<b>500.000</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota</b>		<b>Jumlah Fasilitas / Insentif Penanaman Modal yang diberikan</b>	<b>35%</b>	<b>100.000</b>	APBD Kab.



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	15 Dokumen	500.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	15 Dokumen	100.000	APBD Kab.
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Data Untuk Peta Potensi Investasi</b>	35%	<b>35.000.000</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Data Untuk Peta Potensi Investasi</b>	35%	<b>5.900.000</b>	APBD Kab.
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.900.000	APBD Kab.
	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan</b>	80%	<b>100.000.000</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan</b>	90%	<b>79.000.000</b>	APBD Kab.
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</b>	2 Kegiatan	<b>100.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</b>	2 Kegiatan	<b>79.000.000</b>	APBD Kab.
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	-	100.000.000	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota		Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	-	79.000.000	APBD Kab.
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Jumlah Perizinan yang Diterbitkan</b>	3.803 Izin	<b>399.564.000</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN</b>		<b>Jumlah Perizinan yang Diterbitkan dalam Satu Tahun</b>	3.803 Izin	<b>198.700.000</b>	APBD Kab.



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

			dalam Satu Tahun			PENANAMAN MODAL						
					399.564.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyelesaian Izin Melalui Sistem OSS dan Sistem Daerah	2614 Izin		198.700.000	APBD Kab.
			Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	5.000 Pelaku Usaha	318.564.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	5.000 Pelaku Usaha		183.700.000	APBD Kab.
			Tersedianya layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	750 Orang	30.000.000	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Tersedianya layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	750 Orang		15.000.000	APBD Kab.
		DPMPPTSP	Jumlah kegiatan yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di	30 Kegiatan Usaha	51.000.000	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan		Jumlah kegiatan yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di	30 Kegiatan Usaha		0	APBD Kab.



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

			Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha			Berusaha Berbasis Risiko		Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha			
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Prosentase Pengendalian Perusahaan yang berinvestasi</b>	<b>66,53%</b>	<b>309.100.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Prosentase Pengendalian Perusahaan yang berinvestasi</b>	<b>66,53%</b>	<b>569.981.000</b>	APBD Kab.
	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Pembinaan Penanaman Modal PMDN dan PMA</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>309.100.000</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Pembinaan Penanaman Modal PMDN dan PMA</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>569.981.000</b>	APBD Kab.
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya	75 Kegiatan Usaha	66.500.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya	75 Kegiatan Usaha	85.497.000	APBD Kab.
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan	20 Pelaku Usaha	154.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20 Pelaku Usaha	313.491.000	



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

			Perizinan Berusaha Berbasis Risiko								
	Pengawasan Pelaksanaan Modal	DPMPPTSP	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	300 Kegiatan Usaha	88.600.000	Pengawasan Pelaksanaan Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	300 Kegiatan Usaha	170.993.000	APBD Kab.	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Prosentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola</b>	2,5%	35.500.000	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Prosentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola</b>	2.5%	5000.000	APBD Kab.	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Terintegrasi	65 Perizinan	35.500.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Terintegrasi	65 Perizinan	500.000		



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		Jumlah Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik	65 Dokumen	35.500.000	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		Jumlah Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik	65 Dokumen	500.000	
<b>TOTAL DANA ANGGARAN</b>					<b>5.590.477.420</b>					<b>5.337.974.000</b>	



---

## **2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan masyarakat**

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dan Perijinan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait.



Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025  
Kabupaten Lamongan

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator/Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>NIHIL</b>				



---

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

##### 3.1 Telaahan Terdapat Kebijakan Nasional dan Provinsi

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang penanaman modal dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sesuai pada agenda pembangunan nasional nomor 1 (Satu), **“Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas”**. Sasaran yang hendak dicapai untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian

##### 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, maka berubah pula Visi dan Misi Kabupaten Lamongan. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Lamongan periode 2021-2026, adalah:

**“Terwujudnya Kejayaan Lamongan  
yang Berkeadilan”**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang



terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Kejayaan Lamongan adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
2. Berkeadilan adalah suatu kondisi dimana Kabupaten Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021- 2026 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah
- Misi 2 : Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman
- Misi 3 : Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan
- Misi 4 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram



---

Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (Satu) dan Misi 5 (Lima) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026, yaitu :

### **Tujuan**

1. Meningkatkan Efektifitas Investasi ( Misi 1 )  
Indikator : Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif ( Misi 5 )  
Indikator : Nilai IKM/SKM

### **Sasaran**

1. Meningkatnya Investasi Daerah baik PMDN maupun PMA ( Misi 1 )  
Indikator :
  - Prosentase Peningkatan Realisasi Investasu PMDN
  - Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA
  - Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu
2. Meningkatnya Pelayanan Perijinan ( Misi 5 )



Indikator :

- Nilai SKM
- Nilai SAKIP DPMPTSP

Target tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tujuan Dan Sasaran  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Lamongan**

TUJUAN	SASARAN		2025	KONDISI AKHIR
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
1	2	3	11	12
Meningkatkan Efektifitas Investasi	Meningkatnyarealisasi Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA	Prosentase peningkatan Realisasi Investasi	3.0 %	3.0 %
		Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN	3.0%	3.0%
		Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA	3.0%	3.0%
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Prosentase penyelesaian ijin tepat waktu	99.77	99.77
		Nilai IKM	85.11	85.11
		Nilai SAKIP DPMPTSP	86.83	86.83



---

### **3.3 Program Dan Kegiatan**

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

### **3.4 Program Dan Kegiatan**

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2025 adalah terdiri dari 6 program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan 13 Kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.613.018.234,- (Tujuh Millyar Enam Ratus Satu Puluh Tiga Juta Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) adapun rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Sub kegiatan :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Sub kegiatan :
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tribulan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Sub kegiatan :
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**



- 
1. Kegiatan penetapan pemberian fasilitas/inisiatif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota  
Sub kegiatan :
    - Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
  2. Kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota  
Sub kegiatan :
    - Penyediaan Peta Potensi Dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota
- III. Program Promosi Penanaman Modal**
1. Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota  
Sub kegiatan
    - Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota
- IV. Program Pelayanan Penanaman Modal**
1. Kegiatan pelayanan perijinan dan non perijinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal  
Sub kegiatan
    - Penyediaan Pelayanan Perijinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Risiko Terintegrasi Secara Elektronik
    - Penyediaan dan Pengelolaan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
    - Pemantauan Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**
1. Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota  
Sub kegiatan :
    - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya
    - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha



- Pengawasan Pelaksanaan Modal

**VI. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

1. Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan yang terinterasi sub kegiatan
  - Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik



---

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026 yaitu, **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”** ditempuh melalui lima misi. Oleh karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi Ke 1 (satu) yaitu “Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah”, dan Misi ke 5 (lima) yaitu “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi”.

Selaku Perangkat Daerah penunjang bidang Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam mendukung Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.



**Tabel. T-C.33  
RUMUSAN RENCANA AHIR PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025**

Nama Dinas				: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				Lembar ..... Dari .....				
Kode				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dahna/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18			PENANAMAN MODAL				5.337.974.000				5.094.827.962
2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Nilai IKM Internal Dinas Penanaman Modal & PTSP		83,20%	4.483.793.000	DAU		83,50%	4.351.693.062
2	18	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		5 Dokumen	17.000.00	DAU		5 Dokumen	17.000.000



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	8.500.000	DAU		3 Dokumen	8.500.000
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	2 Laporan	8.500.000	DAU		2 Laporan	8.500.000
2	18	01	2.01		<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan</b>	<b>15 Laporan</b>	<b>2.964.751.000</b>	<b>DAU</b>		<b>15 Laporan</b>	<b>2.964.751.062</b>
2	18	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 Orang	2.947.751.000	DAU		27 Orang	2.947.751.062
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	8.500.000	DAU		1 Laporan	8.500.000



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	14 Laporan	8.500.000	DAU	14 Laporan	8.500.000
2	18	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah administrasi kepegawaian yang dipenuhi</b>	-	-	DAU	2 Administrasi	-
2	18	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pemenuhan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	-	-	DAU	-	-
2	18	01	2.05	09	Pendidikan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	-	-	DAU	-	-
2	18	01	2.05		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi</b>	6 Administrasi	106.124.000	DAU	6 Administrasi	106.024.000



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik	22 Paket	10.000.000	DAU		22 Paket	10.000.000
2	18	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dipenuhi	6 Paket	10.000.000	DAU		6 Paket	10.000.000
2	18	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	20.000.000	DAU		4 Paket	20.000.000
2	18	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 Paket	20.000.000	DAU		3 Paket	20.000.000
2	18	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	8 Dokumen	8.000.000	DAU		8 Dokumen	8.000.000
2	18	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5 Laporan	8.124.000	DAU		5 Laporan	8.024.000
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 Laporan	30.000.000	DAU		5 Laporan	30.000.000
2	18	01	2.07		<b>Pengadaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Pengadaan</b>	<b>2 jenis</b>	<b>-</b>	<b>DAU</b>		<b>2 Jenis</b>	<b>-</b>



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	DAU	4 Unit	-
2	18	01	2.07	06	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	DAU	5 Unit	-
2	18	01	2.07		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>1.132.918.000</b>	<b>DAU</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>1.132.918.000</b>
2	18	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	337.482.000	DAU	4 Laporan	337.482.000
2	18	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Laporan	13.000.000	DAU	3 Laporan	13.000.000



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	782.436.000	DAU		3 Laporan	782.436.000
2	18	01	2.08		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jenis Barang yang dipelihara</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>263.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>4 Jenis</b>	<b>131.000.000</b>
2	18	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	42.000.000	DAU		15 Unit	42.000.000
2	18	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	20.000.000	DAU		3 Unit	20.000.000
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33 Unit	95.000.000	DAU		33 Unit	25.000.000



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	106.000.000	DAU	2 Unit	44.000.000
2	18	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Prosentase Peningkatan Minat Investasi	65,2%	6.000.000	DAU	65,7%	3.600.000
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota	Jumlah Fasilitas / Insentif Penanaman Modal yang diberikan	35%	100.000	DAU	35%	100.000
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	15 Dokumen	100.000	DAU	15 Dokumen	100.000
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Data Untuk Peta Potensi Investasi	35%	5.900.000	DAU	35%	3.500.000
2	18	02	2.02	04	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.900.000	DAU	1 Dokumen	3.500.000



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	80%	79.000.000	DAU		90%	79.000.000
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	79.000.000	DAU		2 Kegiatan	79.000.000
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	-	79.000.000	DAU		-	79.000.000
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan yang Diterbitkan dalam Satu Tahun	3.803 Izin	198.700.000	DAU		3.860 Izin	90.053.900
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Izin Melalui Sistem OSS dan Sistem Daerah	2614 Izin	198.700.000	DAU		2.653 izin	90.053.900



## RENJA DIAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	04	2.01	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	5.000 Pelaku Usaha	183.700.000	DAU	5.000 Pelaku Usaha	75.053.900
2	18	04	2.01	07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Tersedianya layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	750 Orang	15.000.000	DAU	750 Orang	15.000.000



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	04	2.01	008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah kegiatan yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	30 Kegiatan Usaha	-	DAU	30 Kegiatan Usaha	-
2	18	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Prosentase Pengendalian Perusahaan yang berinvestasi</b>	66,53%	569.981.000	DAU	67.03%	569.981.000
2	18	05	2.01		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pembinaan Penanaman Modal PMDN dan PMA</b>	12 Bulan	569.981.000	DAU	12 Bulan	569.981.000
2	18	05	2.01	04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	75 Kegiatan Usaha	85.497.000	DAU	75 Kegiatan Usaha	85.497.000



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	05	2.01	05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20 Pelaku Usaha	313.491.000	DAU		20 Pelaku Usaha	313.491.000
2	18	05	2.01	06	Pengawasan Pelaksanaan Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	300 Kegiatan Usaha	170.993.000	DAU		300 Kegiatan Usaha	170.993.000
2	18	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Prosentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola</b>	2,5%	5000.000	DAU		3%	500.000
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Terintegrasi	65 Perizinan	500.000	DAU		65 Perizinan	500.000



## RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	06	2.01	01	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik	65 Dokumen	500.000	DAU	65 Dokumen	500.000



---

**BAB V**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Perubahan Dinas Kabupaten Lamongan adalah Program Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Lamongan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

**5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra



Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

## **5.2 Rencana Tindak Lanjut**

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Lamongan, Agustus 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN LAMONGAN**



**Drs. HAMDANI AZAHARI, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651021 198602 1 003